

Analisis Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat

Mardyana Malawat^{1*}, Zaman Zaini²

^{1,2}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹evamalawat05@gmail.com; ²zamanzaini123@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history :

Received : Agustus 29, 2025

Revised : September 10, 2025

Accepted : September 21, 2025

Kata kunci:

Kinerja
Badan Penghubung,
Koordinasi
Efektivitas
Otonomi Daerah



Copyright (c) 2026

Abiwarra : Jurnal Vokasi

Administrasi Bisnis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, peran Kantor Penghubung menjadi semakin strategis dalam memastikan koordinasi, komunikasi, dan implementasi kebijakan secara efektif antara dua tingkat pemerintahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara dipengaruhi oleh beberapa kendala internal, seperti sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Maluku Utara belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi Badan Penghubung, sehingga cenderung tidak melibatkan lembaga ini dalam kegiatan koordinasi maupun konsultasi ke pusat, kurangnya penggunaan teknologi informasi dan sistem komunikasi yang modern dan terintegrasi dapat memperlambat proses penyampaian informasi dan koordinasi, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta alokasi anggaran yang terbatas. Meskipun demikian, upaya-upaya seperti peningkatan koordinasi, penguatan komunikasi, penguatan kelembagaan serta pemanfaatan teknologi informasi mulai diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kinerja Kantor Penghubung guna mendukung sinergi pusat-daerah dan pencapaian pembangunan nasional.

PENDAHULUAN

Peningkatan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi semakin krusial dalam era desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Peran Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara sebagai mediator dan fasilitator utama dalam komunikasi dan koordinasi antara kedua tingkatan pemerintahan, hal ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam memastikan sinergi yang harmonis dan optimalisasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Kantor Penghubung Provinsi Maluku Utara, dalam konteks ini, memiliki tugas yang sangat strategis untuk menjembatani berbagai kepentingan, kebijakan, dan program antara pemerintah daerah Maluku Utara dan Pemerintah Pusat. Namun, di tengah perkembangan kebijakan dan dinamika pemerintahan yang terus berubah, terdapat tantangan-tantangan yang signifikan dalam menjalankan peran ini. Efektivitas dan efisiensi kinerja Kantor Penghubung Provinsi Maluku Utara dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator dan fasilitator dengan Pemerintah Pusat perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa fungsi dan peran Kantor Penghubung Provinsi Maluku Utara dapat berjalan sesuai dengan target dan kebutuhan *stakeholders*.

Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara harus dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dapat diterapkan dengan baik di Maluku Utara, selanjutnya kebijakan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat Pemerintah Pusat.

Efektivitas kinerja Kantor Penghubung Provinsi Maluku Utara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain belum optimalnya koordinasi antara OPD lingkup Provinsi Maluku Utara dengan Badan Penghubung. Di Provinsi Maluku Utara, belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melibatkan Badan Penghubung dalam aktivitas koordinasi maupun konsultasi dengan pemerintah pusat.



<http://ojs.stiami.ac.id>



abiwarajournal@stiami.ac.id

Akibat kurangnya pelibatan, proses koordinasi sering kali berjalan kurang efektif. Beberapa agenda menjadi tumpang tindih, ada kegiatan yang seharusnya bisa difasilitasi lebih cepat justru memerlukan waktu tambahan, bahkan kadang memunculkan kesan bahwa hubungan pusat–daerah belum sepenuhnya solid.

Dengan kata lain, keberadaan Badan Penghubung dapat menciptakan efisiensi nyata, baik dari sisi waktu, biaya perjalanan, maupun energi yang dikeluarkan OPD ketika berurusan dengan pusat. Selain itu, pelibatan Badan Penghubung juga memberi peluang lahirnya sinergi yang lebih kuat. OPD dapat fokus pada substansi programnya, sementara Badan Penghubung membantu membuka akses, mempermudah komunikasi lintas kementerian/lembaga, dan mendukung tindak lanjut hasil konsultasi agar tidak berhenti sebatas pertemuan.

Kurangnya penggunaan teknologi informasi dan sistem komunikasi yang modern dan terintegrasi dapat memperlambat proses penyampaian informasi dan koordinasi. Di era digital saat ini, kebutuhan akan wadah informasi berbasis teknologi menjadi semakin mendesak, terutama dalam mendukung hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran sebuah website resmi dan platform digitalisasi lainnya dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan transparansi.

Meskipun demikian, sebagian besar input yang diterima berfokus pada urusan umum, sementara upaya untuk mempercepat pembangunan daerah belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kekurangan ini menunjukkan bahwa, meskipun proses administrasi berjalan dengan baik, Badan Penghubung belum sepenuhnya efektif dalam mengarahkan dan mempercepat inisiatif pembangunan yang lebih terintegrasi, yang berdampak signifikan pada kemajuan wilayah Aceh. (Maharani, 2021).

Berdasarkan hasil studi terdahulu dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam memfasilitasi urusan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sudah berjalan dengan cepat dan efisien, walaupun untuk mendorong percepatan pembangunan daerah belum signifikan. Untuk itu diperlukan langkah penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah memahami bagaimana Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara membantu urusan pemerintah pusat dan daerah. Setelah analisis yang menyeluruh selesai, diharapkan bahwa hal-hal yang perlu diperbaiki dan cara terbaik untuk meningkatkan fungsi dan peran Badan Penghubung. Ini akan memungkinkan Badan Penghubung untuk berkontribusi secara maksimal terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Provinsi Maluku Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Publik

Nicholas Henry dalam Mulyadi (2016:34) yang mendefinisikan tentang administrasi publik bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan”.

Organisasi

Zhang et al (2020), dalam organisasi terdapat perbedaan antara membuat keputusan sendiri dan membuat keputusan kelompok. Keputusan organisasi membenarkan keberadaan, dan menjelaskan struktur, organisasi yang anggotanya harus mengoordinasikan komunikasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan antara komunikasi dan pengambilan keputusan sangat penting untuk desain sistem tertentu dari tata kelola organisasi. Istilah yang digunakan Plato untuk membahas pemerintahan kota (*kubernaen* dalam bahasa Yunani, yang berarti 'mengarahkan') dan yang, setelah Perang Dunia II, mengilhami landasan '*cybernetics*' sebagai kontrol ilmiah sistem sosial yang melibatkan manusia dan teknologi (Ohreen et al., 2021).

Pemerintah Daerah

Menurut M. Ridwan (2008), mendefinisikan Pemerintah Daerah adalah lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di tingkat daerah, seperti penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan pengelolaan

sumber daya lokal. Ridwan juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan khusus daerahnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kualitas.

Analisis Kinerja

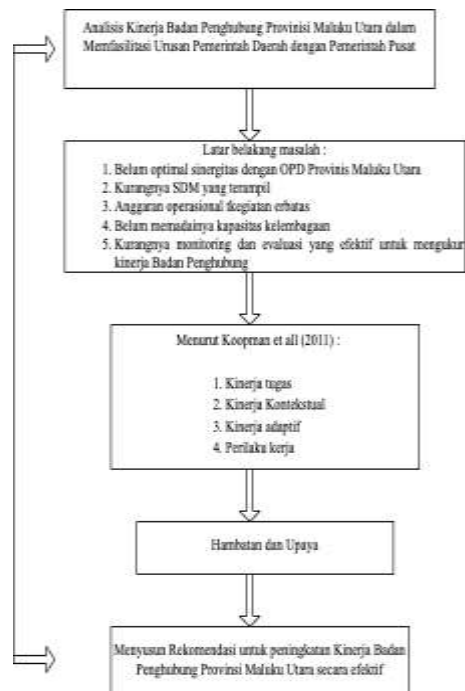
Secara umum kinerja merupakan hal-hal seperti produktivitas, keterampilan, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Untuk kelompok, kinerja dapat juga merujuk pada tingkat pencapaian hasil atau tujuan yang diinginkan oleh individu, kelompok, atau organisasi dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, kinerja mencerminkan kualitas hasil yang dihasilkan dari aktivitas atau usaha yang dilakukan (Fauzi, 2020).

Raja Bahrial Akbar (2013) Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Pengembangan Karier dan Kepuasan Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, pengembangan karier dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 1) Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai badan penghubung provinsi Riau di Jakarta. 2) Pengembangan karier berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai badan penghubung provinsi Riau di Jakarta. 3). Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai badan penghubung provinsi Riau di Jakarta. 4). Kepemimpinan, pengembangan karier dan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai badan penghubung provinsi Riau di Jakarta.

Tri Maharani, Dadan Kurnia dan Toto Kushartono (2021). Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Aceh Ke Pemerintah Pusat Guna Memajukan Pembangunan Daerah Aceh. Hasil penelitian menunjukkan 1) Karakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Pameran, yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Aceh yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama. 4) Kebijakan dan Praktik Manajemen dalam Renstra 2017-2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun usaha-usaha untuk membangun daerah Aceh berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penafsiran/teori yang mendasari kajian mengenai isu sosial atau kemanusiaan tertentu. Peneliti kualitatif menggunakan pendekatan investigasi kualitatif yang muncul, pengumpulan data dalam lingkungan alami yang sensitif pada orang dan tempat penelitian, dan analisis data yang induktif dan deduktif serta menetapkan pola atau tema untuk mempelajari masalah ini. Laporan atau presentasi akhir yang mencakup suara informan kunci, reflektivitas peneliti, deskripsi kompleks dan interpretasi masalah, dan kontribusi terhadap literatur atau saran rekomendasi untuk perubahan (Creswell, 2013: 42).



Gambar 1. Model Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian dengan lebih komprehensif dan relevan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, data didapat melalui data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data dokumen fisik dan akan dianalisis oleh peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Analisis Kinerja Kantor Penghubung Provinsi Maluku Utara dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Penghubung serta merumuskan rekomendasi yang relevan guna peningkatan efektivitas fasilitasi hubungan antara pemerintah daerah dan pusat.

Permasalahan yang ditemukan mencakup belum optimalnya sinergi dengan OPD Provinsi Maluku Utara, keterbatasan SDM yang terampil, minimnya anggaran operasional, kapasitas kelembagaan yang belum memadai, serta kurang efektifnya sistem monitoring dan evaluasi.

Kinerja tugas menyangkut pelaksanaan fungsi utama Badan Penghubung dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Informan 1 (Kepala Badan Penghubung) menjelaskan bahwa: “Tugas utama dijalankan secara kelembagaan, dengan koordinasi lintas sektoral berkesinambungan, meski belum sepenuhnya efektif karena kendala teknis dan non-teknis”.

Sebagai Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara, Ibu Lestari menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas-tugas utama lembaga dijalankan secara kelembagaan yang berlandaskan pada fungsi formal sebagai representasi Pemerintah Provinsi di tingkat pusat. Ia menegaskan bahwa peran Badan Penghubung bukan sekadar administratif, melainkan strategis dalam membangun *jembatan komunikasi* yang berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Fungsi ini dijalankan melalui koordinasi lintas sektoral secara berkesinambungan, mencakup interaksi dengan berbagai kementerian/lembaga, mitra kerja pusat, dan OPD yang memiliki program kerja strategis.

Dalam praktiknya, koordinasi lintas sektoral ini dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari fasilitasi audiensi antara pejabat daerah dan pusat, penyusunan kegiatan promosi daerah, hingga pendampingan administratif atas usulan program OPD ke kementerian. Kepala Badan menekankan pentingnya jejaring informal dan kepercayaan kelembagaan, yang selama ini menjadi modal sosial utama dalam mendekatkan kepentingan daerah kepada pengambil kebijakan pusat.

Sementara itu, dari sisi non-teknis, kurangnya pemahaman dari beberapa OPD terhadap fungsi Badan Penghubung kerap menimbulkan tumpang tindih koordinasi, atau bahkan *by pass* langsung ke kementerian tanpa melibatkan penghubung. Hal ini menyebabkan proses fasilitasi menjadi tidak terstruktur, dan kadang menimbulkan miskomunikasi atau tidak sinkronnya data dan kebijakan antar level pemerintahan.

Kinerja Adaptif Aspek inii terkait kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan eksternal. Aspek inii merujuk pada **kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan eksternal, tantangan kebijakan, dinamika kelembagaan, serta kebutuhan pemangku kepentingan yang terus berkembang**. Dalam konteks organisasi pemerintahan, adaptasi menjadi indikator penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya menjalankan fungsi rutinnya, tetapi juga mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap berbagai kondisi eksternal yang berubah-ubah, seperti regulasi baru, arahan kebijakan pusat, perubahan struktur birokrasi, hingga kebutuhan daerah yang semakin kompleks. Organisasi yang adaptif akan cenderung lebih mampu bertahan dan relevan, bahkan dalam situasi ketidakpastian birokrasi atau transisi kebijakan. Sebaliknya, organisasi yang gagal beradaptasi akan mengalami stagnasi peran, tidak dipercaya oleh pemangku kepentingan, dan berisiko mengalami penurunan kinerja.

Perilaku kerja menunjukkan semangat pengabdian yang cukup tinggi, namun masih terbatas inisiatif dan dorongan inovatif dari internal organisasi. Evaluasi lintas-informan menunjukkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara telah menjalankan fungsi dasar sebagai penghubung, tetapi: Perlu penguatan dari sisi internal organisasi (SDM, SOP, dan anggaran), butuh pemahaman bersama dengan OPD agar fungsi penghubung lebih dimanfaatkan, harus ditingkatkan kapasitas adaptasi dan inovasi, termasuk digitalisasi komunikasi dan fasilitasi, diperlukan pendekatan manajerial berbasis kolaborasi dan keterbukaan informasi.

Kinerja tugas merujuk pada efektivitas pegawai dan organisasi dalam melaksanakan tugas utama dan fungsi formal yang telah ditetapkan. Dalam konteks Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara, fungsi utamanya adalah menjembatani komunikasi, koordinasi, dan fasilitasi antara Pemerintah Provinsi dan instansi pusat.

Bahwa secara umum tugas-tugas pokok terlaksana sesuai rencana kerja. Namun, sebagian responden menyoroti bahwa koordinasi formal dengan OPD sering kali kurang berjalan optimal. Komunikasi lebih sering dilakukan secara informal, sementara secara regulatif tidak ada keharusan bagi OPD untuk melibatkan Badan Penghubung dalam urusan ke pusat.

Sering kali OPD langsung berkoordinasi ke kementerian tanpa melewati Badan Penghubung. Hal ini menghambat efektivitas lembaga karena peran fasilitator tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sementara itu, mengaku tidak pernah melibatkan atau menggunakan jasa Badan Penghubung, bahkan ada yang tidak mengetahui fungsi dan keberadaan lembaga ini.

Menurut Gibson et al. (2009), kinerja tugas mencakup pelaksanaan tanggung jawab pekerjaan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kinerja tugas dapat diukur dari aspek ketepatan, kecepatan, dan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan standar operasional prosedur.

Penelitian oleh Yuliana (2019) menunjukkan bahwa kinerja tugas di lembaga penghubung sangat bergantung pada kejelasan regulasi hubungan antarlembaga. Tanpa kerangka regulatif yang jelas, lembaga penghubung cenderung bersifat pasif dan tidak terlibat dalam proses birokrasi lintas instansi.

Kemampuan adaptasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja organisasi publik. Dalam konteks Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara, adaptasi mencakup sejauh mana lembaga ini mampu menyesuaikan diri dengan dinamika birokrasi di tingkat pusat, perubahan kebijakan nasional, serta kebutuhan pemangku kepentingan daerah.

Dalam menelaah aspek adaptasi organisasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa Badan Penghubung telah melakukan evaluasi terhadap program kerja dan sumber daya manusia secara berkala. Evaluasi ini dimaksudkan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan internal. Namun demikian, efektivitas dari evaluasi tersebut dalam mendorong perubahan nyata di tingkat operasional masih menemui sejumlah kendala. Meskipun evaluasi dilakukan secara formal, penerapannya belum sepenuhnya mampu mengarahkan organisasi menuju pola kerja yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan eksternal, khususnya dalam menjawab kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah pusat.

Salah satu tantangan utama terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam hal keterampilan teknis maupun kemampuan adaptif terhadap perubahan lingkungan birokrasi nasional. Ketergantungan pada pola kerja yang bersifat reaktif—yang hanya merespons ketika terjadi permintaan dari pihak luar—menunjukkan bahwa proses adaptasi belum dijalankan secara proaktif. Hal ini berdampak pada efektivitas Badan Penghubung dalam memainkan peran strategis sebagai fasilitator hubungan antara pemerintah daerah dan pusat.

Lebih lanjut, kritik eksternal menyoroti lemahnya daya adaptasi kelembagaan Badan Penghubung dalam menghadapi dinamika kebijakan nasional. Lembaga ini dinilai belum mampu secara sistemik memanfaatkan peluang-peluang kebijakan pusat untuk mendukung pembangunan daerah. Fungsi penghubungan yang seharusnya menjadi jembatan antara dua tingkat pemerintahan belum dijalankan secara optimal, baik dalam aspek komunikasi strategis, diplomasi kebijakan, maupun pelayanan informasi lintas sektor.

Kritik terhadap rendahnya tingkat inovasi juga menjadi perhatian. Beberapa pihak dari OPD menyampaikan bahwa mereka belum mengetahui adanya inovasi layanan yang dilakukan oleh Badan Penghubung. Minimnya sosialisasi serta penetrasi kelembagaan ke lingkungan OPD menunjukkan adanya kekosongan dalam strategi komunikasi dan pengembangan relasi eksternal. Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa organisasi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi institusi yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Namun demikian, terdapat inisiatif positif dari internal organisasi yang mendorong perubahan ke arah yang lebih adaptif. Beberapa pihak mengusulkan pengembangan sistem informasi kelembagaan, seperti penyediaan informasi dari kementerian / lembaga secara terpusat melalui media digital. Usulan ini menunjukkan adanya kesadaran internal akan pentingnya transformasi digital dan inovasi layanan sebagai respons terhadap tuntutan *stakeholders* yang semakin kompleks.

Temuan ini relevan dengan pendekatan teori adaptasi organisasi menurut Miles dan Snow (1978), yang menekankan bahwa organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal melalui inovasi, pemanfaatan informasi, dan perubahan struktural. Dalam konteks ini, Badan Penghubung berada dalam posisi yang memerlukan penguatan fungsi-fungsi tersebut agar dapat memainkan peran strategis yang lebih aktif dan relevan.

Selain itu, hasil penelitian Hartati (2020) mengenai adaptasi organisasi publik menunjukkan bahwa keberhasilan adaptasi sangat bergantung pada dukungan sistem informasi, kapasitas SDM, dan keberanian untuk melakukan inovasi. Penelitian lainnya oleh Rizaldi dan Sari (2021) menyimpulkan bahwa organisasi pemerintah yang mampu merespons perubahan lingkungan secara cepat akan lebih dipercaya dan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas kebijakan. Sementara itu, studi oleh Kusuma (2019) menyatakan bahwa inovasi kelembagaan dan keterbukaan informasi menjadi dua elemen kunci dalam meningkatkan daya adaptasi organisasi publik dalam konteks hubungan pusat-daerah.

Penelitian oleh Sulistiyani dan Rosidah (2018) tentang kinerja lembaga penghubung antar daerah menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM dan dukungan informasi yang terstruktur. Studi tersebut menyimpulkan bahwa lembaga penghubung yang gagal beradaptasi akan cenderung tidak dilibatkan oleh OPD karena dianggap tidak fungsional. Selanjutnya, penelitian oleh Putra (2020) dalam kajiannya mengenai Badan Penghubung Daerah X menyoroti bahwa kurangnya inovasi informasi dan kelemahan penetrasi kelembagaan menyebabkan lembaga tersebut hanya berperan sebagai unit administratif, bukan aktor strategis. Rekomendasi utama dalam

penelitiannya adalah penguatan sistem informasi kelembagaan dan penataan ulang peran penghubungan dalam konteks kerja lintas instansi. Penelitian lain oleh Hadi (2021) menyimpulkan bahwa organisasi yang memiliki budaya evaluatif tetapi tidak diiringi dengan tindakan perbaikan strategis cenderung mengalami stagnasi dalam performa adaptif. Hal ini memperkuat temuan di lapangan bahwa evaluasi saja tidak cukup tanpa implementasi nyata dalam bentuk inovasi.

Dengan demikian, peningkatan daya adaptasi Badan Penghubung tidak hanya memerlukan evaluasi internal yang rutin, tetapi juga penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, serta pergeseran pola kerja dari reaktif menjadi proaktif agar lebih mampu menjawab tantangan birokrasi lintas pemerintahan secara strategis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan Kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara dalam memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat prosesnya masih belum optimal, rendahnya koordinasi dua arah, serta minimnya sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi Badan Penghubung. Dengan demikian, secara keseluruhan, **kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara dalam memfasilitasi komunikasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat masih bersifat administratif dan belum transformatif**, sehingga belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi sinergi antara daerah dan pusat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Keterbatasan kapasitas dan responsivitas SDM, lemahnya inovasi dan perilaku kerja pegawai, kurangnya sistem informasi yang mendukung komunikasi lintas lembaga, serta minimnya relasi fungsional dengan OPD dan instansi pusat. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya penguatan kelembagaan secara struktural maupun dukungan anggaran dan kebijakan yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara masih perlu diperkuat baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, inovasi kerja, maupun jejaring antar instansi, agar dapat menjalankan fungsi strategis secara optimal sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan pusat.

Saran

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu mengeluarkan regulasi khusus, seperti surat edaran gubernur atau peraturan gubernur, yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkoordinasi dengan Badan Penghubung dalam setiap agenda yang melibatkan instansi pusat. Regulasi ini bertujuan untuk mempertegas posisi dan fungsi kelembagaan Badan Penghubung sebagai fasilitator utama komunikasi lintas pemerintahan, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih atau ketidakterlibatan dalam kegiatan strategis daerah di pusat.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya mutlak diperlukan agar lembaga ini dapat menjalankan perannya secara optimal. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan alokasi anggaran yang memadai, termasuk untuk pengembangan kompetensi aparatur, penambahan tenaga profesional, serta dukungan operasional kegiatan representatif di tingkat nasional. Dengan kapasitas yang memadai, Badan Penghubung tidak hanya mampu melaksanakan fungsi administratif, tetapi juga dapat tampil sebagai representasi strategis daerah dalam berbagai forum kebijakan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, I., & Alikha, R. (2022). *Evaluation of Deconcentration Funds in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) Central Java Province*.
- Budiasa, I. Komang. (2021). *Beban Kerja dan Kinerja Sumber Daya Manusia*. Pena Persada.
- Busro, M. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Los Angeles: SAGE.
- Dahlan. (2023). *Indikator Kinerja Utama dan Sistem Evaluasi*.
- Dessler, G. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 10. Jakarta: Indeks.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Eka Adhila. (2023). *Analysis of the Impact of Village Fund Assistance on the Effectiveness of the Use of Village Funds*.
- Harbani, Pasalong. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Kasmir. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Depok: Rajawali Pers.
- Koopmans, L, et al, (2011), Conceptual Frameworks of individual work performance A Systematic Review, *Journal Of Occupational and Environmental Medicine*, Vol 53, No.8.
- Maria paristiowati, Muhammad Ridha Albaar, (2019), Krickpatrick's Model For Evaluation of Financial Management Training, 5 th International Conference on Food, agriculture and Natural Resources 2019 (FANRes 2019).
- Maharani, T., Kurnia, D., & Kushartono, T. (2021). Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat Guna Memajukan Pembangunan Daerah Aceh. *Caraka Prabhu: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 127–140.
- Muhammad Ridha Albaar (2020), Implementasi E-Government dalam Menciptakan Pemerintahan Baik dan Bersih. *Syntax Computama*.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman. (2017). *Administrasi dalam Pemerintahan*
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif: Analisis Isi dan Studi Kasus*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.